

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ atau $t_{hitung} 10,709 > t_{tabel} 1,679$. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dapat membangun akuntabilitas kinerja yang baik.
2. Pelaksanaan Anggaran berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikan $0,470 > 0,05$ atau $t_{hitung} 0,729 < t_{tabel} 1,679$. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.
3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikansi pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran adalah $0,802 > 0,05$ atau $t_{hitung} - 0,252 < t_{tabel} 1,679$. Hal ini membuktikan bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran belum bisa untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.

4. Evaluasi kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Kupang. Hal ini diketahui dari nilai signifikan $0,000 > 0,05$ atau $t_{hitung} 0,729 < t_{tabel} 1,679$. Hal ini membuktikan bahwa evaluasi kinerja mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik.
5. Berdasarkan uji F, diketahui bahwa nilai f_{hitung} sebesar 95,056 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, maka secara bersama-sama akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut yakni perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja.
6. Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah 0,885 yang berarti 88,5% merupakan variasi variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja (Y) dapat dijelaskan atau merupakan kontribusi dari keempat variabel independen yaitu perencanaan anggaran (X1), Pelaksanaan anggaran (X2), pelaporan/Pertanggungjawaban anggaran (X3) dan evaluasi kinerja (X4). Sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan oleh variabel lain yang terdapat diluar model ini.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Dalam hal Perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja perlu adanya monitoring dari pemerintah pusat agar anggaran yang diberikan untuk pemerintah sepenuhnya digunakan untuk keperluan program/kegiatan yang

telah disusun untuk menciptakan pemerintah yang baik dengan ditandai tercapainya visi misi organisasi melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang baik.

2. Untuk Pelaksanaan anggaran agar pengelolaan dan efisiensi dapat ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya, agar kegiatan atau program yang sudah dianggarkan dapat terealisasi sesuai anggaran yang sudah dianggarkan, dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana agar terlaksana 100% atau sesuai target. Sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja pada BKD Kota Kupang.
3. Dalam membuat pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi BKD Kota kupang agar masyarakat memperoleh manfaat dari anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang sudah dibuat bisa diterapkan dengan baik pada tahun yang akan datang, sehingga terciptanya akuntabilitas kinerja yang dicapai.
4. Dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pada BKD Kota Kupang yang baik, Pemerintah dapat memaksimalkan pencapaian kinerja dengan tetap mengusahakan pencapaian kinerja 100% sesuai dengan visi dan misi BKD Kota Kupang.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel-variabel lain

yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

6. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas Daerah penelitian dan memperbanyak jumlah responden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdul Halim. 2015. *Manajemen Keuangan Bisnis: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Angreini Pangumbalerang, Sherly Pinatik (2020). *Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas*

Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola keuangan Dan Barang Milik Daerah

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) (2008)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Buku 2 Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (2009)

Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat

Budi Santoso. 2015. *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Deddi Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat; Jakarta

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Penerbit Erlangga; Jakarta

Mardiasmo., 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Mahmudi, 2015., *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi ke 2.*, UPP STIM YKPN; Yogyakarta

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.

Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta; Bandung. 2018., *Manajemen Keuangan Daerah*, Andi; Yogyakarta.

Nafarin, 2021., *Penganggaran Perusahaan*, edisi 3., Salemba Empat; Jakarta

Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2003). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011.

Sugiyono.2010. *Statistika Untuk Penelitian.*, Alfabeta; Bandung.
+2008.,*Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit UPP STIM
YKPPN.Yogyakarta.2014.

Jurnal/skripsi :

Abdillah, Rizal Fitri, Agus Salim, and Hari Purnomo, 2019. *Pengaruh Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintahan Di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Jurnal Riset Akuntansi* 2(3).

Dewi Selviani. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi*

Ghozali, 2009.,*Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Menggunakan IBM SPSS 21*, ed.7, Ghanesha; Bandung.

Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Pustaka Ilmu; Yogyakarta

Haspiarti. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap*

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintahan Kota Parepare). Skripsi Makassar: Jurusan Akuntansi, Umversitas Hasanudin.

Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adiputra, Nyoman Ari Surya Darmawan. (2014). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2

Muhamad Sya'Roni. (2019). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Danriset Akuntansi: Volume 8, Agustus 2019*.

Nila Aprilia, Melfarisa.(2014) *Pengaruh Penerapan Angaran Berbasiskinerja Terhadap Akuntabilitas Kijerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Jurnal Fairness: Vulume 4, Nomor 2, Juli 2014*.

Nur Desiana Wardani,Dewi Silvia. (2021). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasarananggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp)Provinsi Lampung*.

Rahayu (2019) *Pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah OPD Surabaya*

Rakhmi, Anggi Aisyah (2018) *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo*. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Safaruddin dan Sutriana Basr. (2020). *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari)*.

Peraturan :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kinerja Pemerintah
Permendagri No 13 Tentang Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta; Bandung.2018., *Manajemen Keuangan Daerah*, Andi; Jogjakarta.

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Nomor 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah*

Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Wilza Utami,H. Afrizal, Asep Machpudin. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
Jurnal. Universitas Jambi.